Croscutting Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun2024

VISI :
PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH

MISI :
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat

SASARAN :
1. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan
2. Meningkatnya Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan dan Aset DaerahPemerintahan Daerah

1. 47 OPD SEKABUPATEN PURWAKARTA
2. KEMENDAGRI
3. KEMENKEU
4. BJB
5. TASPEN
6. BPKP
7. BPK-RI

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA
Rp. 93.471.119.785

- Capaian SAKIP Perangkat Daerah : A

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Disusun = 10 Dokumen

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah = 44 Dokumen

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah = 6 Dokumen

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun = 4 Dokumen

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Jumlah paket penyediaan administrasi umum perangkat daerah = 25 Paket

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan = 83 Unit

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah = 36 Laporan

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara = 86 Unit

Sekretariat

Bidang Pengelolaan Aset Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Rp. 2.026.007.000

1. Manajemen Aset : 1. Tersedianya daftar asset tetap 2. Tersedianya manual untuk menyusun daftar asset tetap 3. Tersedianya proses inventarisasi asset tahunan 4. Tersedianya nilai asset tercantum dalam laporan anggaran (ya/tidak)
2. Persentase BMD yang dimanfaatkan optimal (100%)
3. Persentase aset tanah yang sudah bersertifikat (25%)
4. Persentase kesesuaian RKA-SKPD dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (70%)
5. Persentase pengolah BMD yang dibina (100%)
6. Persentase penyusutan/ penghapusan BMD (100%)
7. Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif (3 Baik)
8. Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan (3Baik)
9. Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif (3Baik)
10. Administrasi BMD yang Andal (3Baik)

1.Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah = 19 Dokumen
- Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota = 100 Orang

Bidang Anggaran

Bidang Perbendaharaan, Penatausahaan dan Akuntansi

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Rp. 394.890.231.719

1. Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan (15%)
2. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) (85%) 15. Opini Laporan Keuangan (WTP) 3. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (75,54) 4. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (2,13%) 5. Persentase SILPA terhadap APBD (1,74%) 6. Persentase belanja pendidikan (20%) (32%) 7.Persentase belanja kesehatan (10%) (21%) 8. Bagi hasil kabupaten/kota dan desa (1,80%)
9. Penetapan APBD (Tepat Waktu) 10.Kesesuaian Dokumen Penganggaran (6Indeks) 11. Alokasi Anggaran Belanja dalam APBD (20skor) 12. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (8Skor) 13. Penyerapan Anggaran (20Skor) 14. Kondisi Keuangan Daerah (4Skor)

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah= 23 Dokumen

2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan DaerahJumlah Dokumen
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah = 52 Dokumen

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah = 4 Dokumen

4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Dokumen Pelaporan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Disusun = 4 Dokumen

5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD Lingkup Keuangan Daerah = 2 Dokumen